



Pemkab Percepat Pembangunan 5 SMP dan 2 SMA Negeri Baru

MANGUPURA, NusaBali

Menyikapi kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2018/2019, Pemerintah Kabupaten Badung mempercepat rencana pembangunan sekolah baru. Setidaknya, Pemkab Badung bakal menambah lima SMP baru dan dua SMA negeri.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjelaskan, pembangunan sekolah baru tingkat SMP dan SMA negeri ini sebagai salah satu solusi atas kisruh dalam PPDB. Seperti diketahui pada PPDB tahun pelajaran 2018/2019 aturan zonasi membuat masyarakat kelimpungan. Salah satu contohnya di Kecamatan Abiansemal, jenjang pendidikan SMA di sana hanya ada satu. Begitu juga di Kecamatan Kuta Selatan hanya ada satu SMA negeri dan satu SMK negeri.

Untuk SMP negeri, pemerintah telah menetapkan sekolah baru sebagai berikut, SMPN 6 Mengwi di Kekeran, SMPN 7 Mengwi di Cemagi, SMPN 5 Abiansemal di Latu, SMPN 3 Kuta Utara di Kerobokan Kelod, dan SMPN 3 Kuta di

Kedonganan.

"Dengan penambahan sekolah baru ini akan mampu menambah daya tampung sekolah negeri sebanyak 720 siswa," ujar Bupati Giri Prasta pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu (11/7).

Sedangkan untuk SMA rencana akan dibangun di Kecamatan Abiansemal dan Kuta Selatan. Saat ini di Abiansemal baru ada SMAN 1 Abiansemal, dan di Kuta Selatan baru ada satu SMA negeri yakni SMAN 1 Kuta Selatan.

Bupati Giri Prasta mengatakan, dalam upaya memenuhi kebutuhan operasional kegiatan proses belajar mengajar pada sekolah tersebut, pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6.022.275.985,00. Di samping itu, untuk peningkatan kualitas pendidikan, juga telah dirancang berbagai kegiatan peningkatan sarana prasarana pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.191.337.887,00.

"Untuk pembangunan fisiknya akan dilaksanakan pada 2019. Tapi kami telah

mulai dengan pembuatan DED (detail engineering design) dulu pada APBD perubahan ini," ungkapnya.

Namun, imbuah Bupati Giri Prasta, khusus untuk pembangunan SMA, karena kewenangannya ada di pemerintah provinsi, maka setelah pembangunan gedung dan mebel sekolah ini rampung akan dihibahkan kepada pemprov. "Harapan kita ke depan tidak ada lagi siswa tidak mendapat sekolah. Dan kenapa kami lakukan ini? Karena *toh* juga yang menggunakan sekolah ini adalah anak-anak didik kita di Badung," tandas bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang, itu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, mengisyaratkan menambah sekolah baru di Badung. Kini pihaknya tengah melakukan kajian terkait hal itu. "Masih kami kaji lokasinya di mana, karena memang harus segera dibangun sekolah baru," kata TIA Kusuma Wardhani saat mengunjungi SMAN 1 Abiansemal, Senin (9/7) lalu. [asa](#)

Edisi : Jumat, 13 Juli 2018

Hal : 2



Tunggakan Pajak Tembus Rp 4 Miliar

Manajemen Bali Handara Siap Negosiasi

SINGARAJA, NusaBali

Upaya penagihan terhadap tunggakan pajak milik Bali Handara Kosaido, yang berlokasi di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng bakal memasuki babak baru. Pihak manajemen, dikabarkan sudah siap bernegosiasi kembali untuk penyelesaian tunggakan tersebut.

Bali Handara memiliki tunggakan pajak sejak 2014, hingga per tanggal 31 Desember 2017 sudah mencapai Rp 3.963.377.870. Tunggakan itu terdiri dari tunggakan pajak hotel Rp 288.770.115, pajak restoran Rp 143.383.091, kemudian PPB paling tinggi sebesar Rp 3.467.336.464, serta pajak air bawah tanah sebesar Rp 63.888.200. Jika ditambah denda, maka tunggakan menembus Rp 4 miliar lebih.

Selama ini pihak Bali Handara sudah berusaha mencil tunggakan tersebut sebesar Rp 10 juta tiap bulannya. Hanya saja, cicilan itu dianggap terlalu kecil tidak sebanding dengan pajak tiap tahunnya. Karena untuk PBB saja, setiap tahun Bali Handara mesti membayar sebesar Rp 800.668.000.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bule-

leng, Bimantara, saat dikonfirmasi terkait perkembangan tunggakan pajak dari Bali Handara, Kamis (12/7) mengatakan, pihak manajemen Bali Handara sudah berkoordinasi dengan pemilik perusahaan yang berada di Jakarta.

Dari hasil koordinasi itu, pemilik perusahaan sudah siap menerima rombongan Pemkab Buleleng guna membahas komitmen penyelesaian tunggakan. "Suratnya sudah disampaikan kepada kita. Mungkin dalam pekan ini, kita akan jadwalkan berkunjung lagi ke Bali Handara," terangnya.

Menurut Bimantara, pihaknya tetap akan meminta komitmen dari pihak manajemen untuk melunasi tunggakan tersebut. Karena, jika tidak ada komitmen, tunggakan itu akan terus bertambah tiap tahunnya, yang justru menyulitkan bagi pihak perusahaan. "Pajak tertinggi itu ada di PBB, lahan golf itu yang paling banyak pajaknya. Saya rasa kalau sudah tidak menguntungkan buat apa dipertahankan. Mungkin saja dulu masih ada yang bermain golf, tetapi sekarang mungkin sepi, ya lebih baik difungsikan yang lain," ujarnya.

Seperti pernah diberitakan, rombongan Pemkab Buleleng dikoordinir Asisten Administrasi Umum, Ketut Asta Semadi, bersama Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bimantara, Kepala Inspektorat, Putu Yasa, dan beberapa staf menemui manajemen Bali Handara Kosaido, Mei 2018 lalu.

Semula rombongan ingin bertemu langsung dengan owner dari Bali Handara Kosaido, namun karena tidak ada, rombongan diterima GM Bali Handara Kosaido, Ni Wayan Jarsen, Catur Kurniawan, dan Made Chandia Atmaja. Dalam pertemuan itu, pihak manajemen Bali Handara Kosaido mengaku, tunggakan itu muncul karena beberapa kali usahanya ditimpa musibah, sehingga mengganggu operasionalnya. Pertama disebutkan pada tahun 2012 silam, 30 kamar hotel dan sebagian dari lapangan golf diterjang longsor. Sehingga kejadian itu berdampak, kunjungan sepi karena takut menginap dan bermain golf. Kemudian di tahun 2016, kembali diterjang longsor, hingga salah satu jembatan menuju hotel putus.

Selain itu, pada tahun 2017,

imbas kunjungan sepi karena dampak Gunung Agung. "Di samping musibah itu, ada juga peringatan-peringatan bagi pengendara yang melintasi jalur Bedugul-Singaraja di saat musim penghujan, juga sangat berimbas pada tingkat kunjungan," kata Ni Wayan Jarsen.

Menurut Jarsen, dengan kondisi seperti itu, pihaknya juga harus tetap memperhatikan masa depan dari karyawan yang berjumlah 150 orang. Artinya meski dengan kondisi sepi, pihak manajemen tetap berusaha membayar gaji karyawan. "Owner kami komit membayar pajak, sebagai buktinya owner mengakui berapapun hutang pajaknya. Saat ini, kami masih harus mengutamakan dulu karyawan, karena kalau tidak dibayar gaji mereka, tentu berdampak pada operasional usaha kami," jelasnya.

Sedangkan untuk peningkatan cicilan pembayaran tunggakan pajak, belum bisa diputuskan. Pihak pengelola masih berkoordinasi dengan pihak owner dari Bali Handara yang berada di Jakarta. Rencana, pihak pengelola akan bersurat, ketika sudah ada hasil koordinasi dengan pihak owner. **k19**

Edisi : Jumat, 13 Juli 2018

Hal : 4



Tahun Lalu, Belanja Daerah Jembrana Tersisa Rp 230 Miliar

NEGARA, NusaBali

Penyerapan belanja daerah Pemkab Jembrana dalam APBD tahun anggaran 2017, belum maksimal. Dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp 1.268.899.677.988 yang disediakan tahun lalu, terealisasi sebesar Rp.1.038.782.383.713 atau sekitar 81,86 persen, dengan sisa anggaran mencapai Rp 230.177.294.275.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Jembrana masa persidangan III tahun sidang 2017/2018 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Wayan Wardana. Agenda rapat adalah laporan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jembrana TA 2017, di ruang sidang DPRD Jembrana, Rabu (11/7). Dalam laporan yang dibacakan oleh Bupati Jembrana I Putu Artha, itu disampaikan 3 poin yakni mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Untuk pendapatan daerah TA 2017, Bupati Artha menyampaikan secara keseluruhan pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, terealisasi sebesar Rp

1.186.843.211.312 atau mencapai 98,77 persen dari target sebesar Rp 1.201.592.435.477. Rinciannya, (PAD) dari target sebesar Rp 119.758.101.825, terealisasi sebesar Rp 121.342.475.323 atau mencapai 101,32 persen. Kemudian pada dana perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp 745.201.854.461, terealisasi sebesar Rp 727.758.128.281 atau mencapai 97,66 persen. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah, dari target sebesar Rp 336.632.479.190, terealisasi sebesar Rp 337.742.607.707 atau mencapai 100,33 persen.

Sedangkan belanja daerah TA 2017, terealisasi belanja daerah adalah sebesar Rp 1.038.782.383.713, atau 81,86 persen dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.268.899.677.988. Adapun belanja daerah itu, terbagi dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung, terealisasi sebesar Rp 495.845.592.823 atau 85,99 persen dari anggaran sebesar Rp 576.610.313.901. Sedangkan pada belanja langsung, terealisasi sebesar Rp 542.936.790.890 atau 78,43 persen dari anggaran sebesar Rp 692.289.364.086.

Kemudian pada pembiayaan daerah TA 2017, yang terbagi

dalam penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, khusus pada penerimaan pembiayaan daerah terungkap realisasi cukup maksimal. Di mana pada penerimaan pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp 83.289.948.667, terealisasi sebesar Rp.79.834.879.194 atau 95,85 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp 15.982.706.156, terealisasi sebesar Rp 7.900.000.000 atau 49,43 persen.

Berdasarkan uraian tersebut, Bupati Artha mengakui masih terdapat beberapa capaian yang belum maksimal, khususnya pada komponen belanja daerah. Hasil yang belum maksimal itu pun dipastikan menjadi bahan evaluasi jajarannya di Pemkab Jembrana. "Hal ini tentunya menjadi catatan penting dan referensi yang sangat berharga bagi kami untuk lebih memperhatikan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di waktu yang akan datang. Ke depan, dalam menyusun perencanaan tahunan, selain memperhatikan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, kami juga akan lebih berhati-hati, dan memperhatikan berbagai dinamika dan kondisi yang mungkin terjadi," ujarnya. **ode**

Edisi : Kamis, 12 Juli 2018

Hal : 7



Banggar Soroti Turunnya Retribusi dan Banyaknya Silpa



RAPAT Banggar DPRD Denpasar bersama Tim Anggaran Setda Kota Denpasar, Rabu (11/7).

• NUSABALI/MIASA

DENPASAR, NusaBali

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Denpasar bersama Tim Anggaran Setda Kota Denpasar membahas terkait pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Denpasar. Pembahasan yang digelar di ruang Rapat Kantor DPRD Kota Denpasar, Rabu (11/7) kemarin dipimpin Wakil Ketua DPRD Denpasar I Wayan Mariyana Wandira didampingi Asisten III Setda Kota Denpasar IGN Eddy Mulya.

Tampak hadir dalam Rapat Pembahasan, sejumlah pimpinan OPD terkait, seperti Dinas Pendapatan, Bappeda, Dinas Perhubungan, Disdikpora, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Bagian Hukum, Probang, serta instansi terkait lainnya. Dalam pembahasan tersebut, anggota Banggar AA Susruta Ngurah Putra menyoroti turunnya perolehan retribusi pada tahun anggaran 2017 dan kurangnya pemanfaatan anggaran yang banyak menjadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran).

Diungkapkannya, beberapa OPD menyisakan banyak anggaran yang menjadi Silpa, yang paling besar anggaran harus menjadi Silpa adalah Disdikpora Kota Denpasar yakni sebanyak Rp 49 miliar, DPUPR menyisakan Rp 36 miliar, Dinas Kesehatan menyisakan Rp 20 miliar, dan RSUD Wanga sebanyak Rp 13 miliar. "Padahal dana itu masih kita perlukan untuk pembenahan sekolah dan infrastruktur di Denpasar. Itu

kan masih bisa digunakan, artinya jika kita di PUPR masih banyak jalan yang bisa dikerjakan," ungkapnya.

Selain itu, Susruta juga menyoroti terkait dengan retribusi parkir di pelataran jalan. Selama ini, pihaknya mendapati banyak parkir di sepadan jalan provinsi dan nasional yang dilarang dilakukan perparkiran. Namun, kenyataannya setiap sore hingga malam jalan provinsi dan nasional malah dimanfaatkan pihak lain yang seharusnya menjadi pendapatan PD Parkir untuk menambah pendapatan yang sempat merosot. "Seperti Teuku Umar itu karcis terdistribusi, dari mana karcisnya itu? Itu yang harus diperhatikan biar tidak ada kebocoran pendapatan kedepan dan harus terus berkomunikasi dengan Bappeda serta Dishub," imbuhnya.

Asisten III Setda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya mengatakan dalam pembahasan itu bertujuan untuk menyamakan persepsi. Terkait laporan keuangan Pemkot Denpasar sudah keenam kalinya Pemkot Denpasar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak Tahun 2012. "Tapi kami bersama-sama membangun komitmen bahwa masukan yang diberikan Dewan tetap kami akan melakukan evaluasi. Sisi yang harus kami benahi ke depan, karena laporan keuangannya, perusahaan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan daerah," ucapnya. **m**

Edisi : Kamis, 12 Juli 2018

Hal : 3